



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Latar belakang diberlakukannya kebijakan SIGP merupakan respon terhadap krisis ekonomi yang berdampak terhadap pembangunan pendidikan, secara khusus untuk membantu sekolah-sekolah yang termiskin dan paling membutuhkan bantuan untuk melakukan perbaikan yang signifikan pada lingkungan belajar. SIGP bertujuan secara khusus untuk: (1) meningkatkan kualitas proses belajar mengajar; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Manajemen pembiayaan SIGP meliputi perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan SIGP menggunakan *top down planning* dan *bottom up planning* melalui penentuan dana *plat the grant* (model bantuan murni) dengan memperhatikan fleksibilitas dan didasarkan pada fakta-fakta serta data yang jelas, menggunakan pemikiran yang logis, dapat diperkirakan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi. Penggunaan dana SIGP mencakup kebutuhan konstruksi maupun non konstruksi melalui sistem *block grant* yang dikelola oleh komite sekolah yang mencerminkan sekolah menerapkan prinsip-prinsip MBS, memberdayakan partisipasi masyarakat, sangat efektif dan efisien, warga sekolah merasa memiliki sekolah, menggerakkan ekonomi masyarakat, terjaminnya transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dana

bantuan SIGP dilakukan secara integratif oleh berbagai lembaga, sedangkan aspek pertanggungjawaban dinyatakan melalui laporan-laporan yang disusun oleh masing-masing pelaksana program pada semua tingkatan menyangkut pelaksanaan pembangunan fisik dan dananya dan laporan pertanggungjawaban keuangan;

Efektifitas kebijakan SIGP telah terbukti sangat tinggi, sekolah dapat memanfaatkan bantuan secara efektif melalui pelimpahan wewenang pengambilan keputusan serta melalui koordinasi, program ini telah menawarkan sebuah model yang bisa dipakai (diadopsi) oleh proyek-proyek lain;

Dalam implementasi kebijakan SIGP masih terdapat masalah yang dihadapi, terutama pada manajemen pembiayaan, solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perlu dilakukan analisa dengan menggunakan metode SWOT, yaitu dengan mengurangi kelemahan dan ancaman, serta meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang.

B. Implikasi

Latar belakang kebijakan merupakan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi sekolah yang menuntut pemerintah, kepala sekolah, guru dan masyarakat untuk mampu mencari solusi terbaik sehingga mutu pendidikan dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan.

Manajemen pembiayaan pendidikan memerlukan fungsi-fungsi yang meliputi: (1) perencanaan dana merupakan proses yang rasional dan mengandung

sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan diperlukan daya dukung para perencana pendidikan yang sangat ahli disertai dengan kelengkapan perangkat keras dan lunak sehingga pendidikan proses perencanaan dapat dilakukan dengan baik; (2) penggunaan dana dengan menggunakan sistem *block grant* merupakan penggunaan dana yang sangat inovatif dan telah memberikan pengaruh yang sangat kuat pada efisiensi dan efektifitas biaya, karena itu diperlukan implementasi yang lebih meluas kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, seperti pengadaan buku, mebeleur, dan peralatan lainnya; (3) Pengawasan dana merupakan fungsi yang sangat penting guna menjamin dana dipergunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan proses pengawasan yang transparan. pertanggungjawaban dana diberikan tidak hanya kepada birokrasi, namun perlu diberikan juga kepada masyarakat agar penggunaan dana bisa akuntabel.

Penggunaan dana dengan menggunakan sistem *block grant* merupakan penggunaan dana yang sangat inovatif dan telah memberikan pengaruh yang sangat kuat pada efektifitas SIGP, karena itu diperlukan implementasi yang lebih meluas kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, seperti pengadaan buku, mebeleur, dan peralatan lainnya.

Pada setiap proses manajemen pembiayaan memiliki potensi untuk terjadinya masalah, sehingga diperlukan kecermatan para pengelola kegiatan untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan bobot persoalan tersebut baik dari segi tingkat kegawatan atau berdasarkan tingkat keperluannya.

C. Rekomendasi

Latar belakang suatu kebijakan harus mencerminkan suatu respon yang mendasar terhadap persoalan pendidikan, karena itu Pemerintah hendaknya mampu menganalisa persoalan pendidikan yang perlu dijadikan prioritas kebijakan.

Manajemen pembiayaan pendidikan selalu berkembang secara dinamis, sistem dan prosedur yang digunakan dalam SIGP sangat kontemporer dan tepat dalam menyiasati begitu banyaknya bangunan sekolah yang rusak versus dana yang sangat terbatas. Karena itu, sangat bijaksana apabila pemerintah mampu mengaplikasikan sistem dan prosedur yang digunakan SIGP tersebut dalam melaksanakan pembangunan rehabilitasi sekolah.

Efektifitas kebijakan SIGP dengan menggunakan pola *block grant* telah berhasil mengembalikan kepedulian masyarakat terhadap sekolah, sehingga Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah beserta sekolah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat. Disamping itu, daya dukung APBD Kabupaten harus ada keberpihakan terhadap pembangunan pendidikan, APBD Kabupaten harus mampu menyediakan dana yang sepadan dengan kebutuhan akan rehabilitasi sekolah yang sangat tinggi.

Permasalahan pada implementasi suatu kebijakan akan selalu timbul, karena itu Pemerintah dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang didukung oleh aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang pembangunan pendidikan.